

# UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PERIKANAN DI DESA PULAU HARAPAN KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nur Fahmi<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Nur Fahmi. Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Perikanan di Desa Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos., M.M. selaku Pembimbing II.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey, wawancara dan dekomendasi guna memperoleh data primer mengenai Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya panen ikan dalam satu kali atau dua kali setahun. Hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat.*

**Key Words:** *Upaya, pemerintah, pengembangan, potensi, perikanan*

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu ternyata membawa akibat yang cukup luas di berbagai bidang aspek kehidupan manusia, akibat bertambahnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat baik yang bersumber dari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [fahmyfathir@gmail.com](mailto:fahmyfathir@gmail.com)

nabati maupun hewani. Satu di antara sumber gizi hewani adalah ikan. Permintaan ikan dalam rangka memenuhi gizi masyarakat memperlihatkan peningkatan cukup signifikan dari waktu ke waktu. Untuk mengimbangi peningkatan permintaan ikan tersebut, maka satu di antara solusinya adalah dengan pengembangan usaha budidaya.

Desa Pulau Harapan berada pada posisi di daratan yang cukup luas dan berada jauh dari sungai yang besar seperti sungai mahakam. Namun, desa ini juga dikelilingi sungai-sungai kecil, sehingga sangat cocok untuk usaha budidaya ikan dalam keramba air tawar. Kegiatan usaha budidaya ikan di desa pulau harapan merupakan pekerjaan yang mendatangkan hasil yang cukup memuaskan bagi masyarakat. Hal tersebut membuat semakin meningkatnya minat pembudidaya ikan dalam akhir-akhir ini.

Usaha pengembangan budidaya ikan dalam keramba air tawar di Desa Pulau Harapan sebagian besarnya adalah ikan mas dan ikan nila. Dua jenis ikan ini banyak di budidayakan karena cara budidayanya yang mudah dan sifat ikan mas dan ikan nila yang relatif tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Ikan mas dan ikan nila juga memiliki rasa daging yang enak dan gurih, kandungan proteinnya pun tinggi. Hal ini menjadikannya banyak diminati dan termasuk satu di antara komoditas perikanan air tawar yang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu.

Usaha pengembangan budidaya ikan dalam keramba air tawar di Desa Pulau Harapan secara intensif berhubungan dengan pertimbangan terhadap kemungkinan munculnya dampak positif atau negatif terhadap jalan usaha.

Mengkaji usaha budidaya ikan diharapkan akan diperoleh gambaran sosial ekonomi masyarakat yang melakukan usaha budidaya ikan dalam keramba air tawar tersebut. Selama ini keuntungan dari usaha budidaya ikan dalam keramba air tawar di Desa Pulau Harapan belum diketahui secara pasti. Hal itu disebabkan belum pernah ada penelitian di desa pulau harapan tentang kegiatan usaha budidaya tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang upaya pemerintah dalam pengembangan potensi usaha budidaya ikan di keramba air tawar di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Otonomi Daerah***

Otonomi berasal dari kata Yunani *outos* (*Auto* = sendiri) dan *nomoi* (*Nomoi* = *Nomos* = Undang-Undang/aturan) yang berarti mengatur sendiri wilayahnya bagian kelompok yang memerintah sebagai tata pemerintahan di daerah (*local government*), “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah hukum pelaksanaan otonomi daerah Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

sebagai berikut “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak mengurus daerah yang bersifat istimewa”. Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

### ***Pelaksanaan Otonomi Daerah***

Sebagaimana diketahui, selama ini khususnya daerah pulau harapan banyak tergantung pada pemerintah daerah, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal dana bagi penyelenggaraan urusan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah terutama bagi daerah yang kurang berkembang. Hal ini senada dengan pernyataan berikut “ pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.” Keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Prajudi Atmo sudirjo dalam buku Hukum Administrasi Negara (1981:19) Pemberian otonomi daerah kepada daerah tidak dipukul rata, artinya isi otonomi masing-masing daerah berbeda, maka melalui berbagai perhitungan faktor-faktor kemampuan nyata dilakukan pemberian otonomi kepada masing-masing daerah sehingga pembangunan masyarakat dapat berlangsung merata keseluruh pelosok.

### ***Potensi Sektor Perikanan***

Salah satu sumber daya alam hayati Indonesia terletak di bidang perikanan baik itu dari perikanan laut (ikan tangkap) termasuk di dalamnya bermacam-macam kegiatan seperti menyimpan, mendinginkan, mengawetkan maupun mengelolanya yang kemudian diekspor keluar daerah, dilihat Kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersil yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Definisi perikanan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya masih kecil.

### ***Pengertian Pengelolaan***

Dalam kamus Bahasa Indonesia (Anonim, 2002: 123) arti kata kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.

Dalam Bahasa Inggris Pengelolaan = “Management” yang artinya : pengurus, tata pimpinan, pengendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudian.

Menurut James Stoner (1996:3) manajemen adalah proses perencanaan ,pengorganisasian ,pengarahan ,dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

### ***Alokasi Dana Desa***

Menurut Sadan (2004:10) “Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 19 Bagian Pertama Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat.

### ***Aspek Ekonomi***

Kadariah (2001), menyebutkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari gejala-gejala dan tingkah laku manusia dalam masyarakat yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Dalam aspek ekonomi diselidiki apakah usaha itu akan memberikan sumbangan atau peranan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi seluruhnya dan peranannya cukup besar untuk membenarkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam analisis ekonomi proyek usaha dilihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan. Dalam analisis

ini yang diperhatikan adalah hasil total atau produktivitas atau keuntungan yang diperoleh dari semua sumber yang di pakai dalam usaha.

### ***Biaya Produksi***

Gilarso (1989), menjelaskan bahwa biaya produksi adalah semua pengorbanan yang perlu untuk suatu proses produksi, dinyatakan dalam uang menurut harga pasar yang berlaku. Biaya produksi berdasarkan jenisnya dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Biaya langsung dan biaya tidak langsung
  - a. Biaya langsung adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan produksi suatu barang.
  - b. Biaya tidak langsung adalah biaya yang berhubungan dengan proses produksi secara keseluruhan.
2. Biaya tetap dan biaya variabel
  - a. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang dengan adanya perubahan jumlah produksi yang dihasilkan.
  - b. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan banyak sedikitnya jumlah produksi yang dihasilkan.

### ***Pendapatan***

Mosher (1987), menyebutkan bahwa pendapatan adalah biaya produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran selama kegiatan usaha berlangsung atau pendapatan adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam suatu proses produksi. Pendapatan menurut Soekartawi (1989), dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diterima dari seluruh hasil penjualan barang produksi.
2. Pendapatan bersih yaitu selisih antara pendapatan kotor dengan pengeluaran atau biaya produksi.

### ***Saluran Pemasaran***

Soekartawi (1989), berpendapat bahwa pada prinsipnya pemasaran adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. Aliran pemasaran ini dapat terjadi karena adanya lembaga pemasaran. Pemasaran adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian barang dan jasa, sejak dari produsen sampai ke konsumen akhir (Arisman, 2000).

### ***Pengertian Good Governance***

Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*governance*” adalah “kepemerintahan”. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam sadarmayanti (2003:6) mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti :

1. Nilai - nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek - aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan - tujuan tersebut.

### ***Pengertian Pelayanan Publik***

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Lukman.S, 2000:8). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan).

Sinambela (2010:5) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberi layanan (malayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan Negara.

### ***Kualitas Pelayanan Publik***

Untuk menilai kualitas pelayanan publik itu sendiri, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan, menurut pendapat Lenvine (1990:188) dalam Dwiyanto (2008:143), maka produk pelayanan publik didalam Negara demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator :

1. Responsivitas adalah gaya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.
2. Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai prinsip - prinsip atau ketentuan - ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah diterapkan.
3. Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma - norma yang berkembang dalam masyarakat.

### ***Definisi Konsepsional***

1. Penelitian dibatasi pada upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi perikanan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kertanegara adalah dengan cara peningkatan produksi dan

produktivitas, penyediaan lapangan kerja melalui perbaikan pendapatan dan menjaga kelestarian sumber daya hayati.

2. Kendala dan cara yang dilakukan oleh pemerintah dan para nelayan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kertanegara untuk tetap bertahan dan berjuang untuk kesejahteraan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Amirudin dan Askin (2006:2) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### ***Fokus Penelitian***

1. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah
  - a. Peningkatan produksi dan produktivitas.
  - b. Penyediaan lapangan kerja melalui perbaikan pendapatan.
  - c. Menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan potensi perikanan di Desa Pulau Harapan

### ***Sumber Data***

Untuk memperoleh sumber data dalam penelitian, maka digunakan teknik sampling yaitu : *Purposive Sampling dan Accidental Sampling*. Dalam memperoleh data menggunakan teknik diatas tentunya telah ditentukan juga yakni :

1. Informan
2. Tempat
3. Dokumen-dokumen

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi dilapangan, penulis menggunakan beberapa cara yakni :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), seperti :
  - 1) Observasi ;
  - 2) Wawancara ;
  - 3) Dokumentasi.

### ***Analisis Data***

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Milles, Huberman dan Saldana (2014) bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup :

Pengumpulan Data

- a. Reduksi Data atau Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
- c. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

### **Hasil Penelitian**

#### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Desa Pulau Harapan merupakan salah satu desa di kecamatan muara muntai kabupaten kutai kartanegara. desa ini memiliki luas 3 km dan berpenduduk sebanyak 1327 jiwa ( 06 Agustus 2014). untuk mencapai daerah ini hanya dapat dilalui dengan jalur sungai menggunakan perahu cs ketinting dan kapal layar. Jarak dari kabupaten sekitar 147 km atau sekitar 3 jam waktu perjalanan. sedangkan jarak ke ibukota provinsi sekitar 179 km atau 4 jam waktu perjalanan. Secara geografis desa pulau harapan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Batuq.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Rebaq Rinding.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Muara Muntai Ilir
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jantur Baru.

#### ***Gambaran Umum Pengembangan Perikanan***

Pengembangan perikanan merupakan salah satu usaha budidaya masyarakat Pulau Harapan. sebab usaha budidaya disana sangat menghasilkan untuk kebutuhan sehari hari. Pengembangan perikanan pada umumnya bersifat harian. dalam arti bahwa budidaya ikan tersebut harus di beri makan 2 atau 3 kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian jika berbicara mengenai hasil dari pengembangan perikanan tersebut tidak dapat dipastikan berapa jumlah per sekali memanen. Sebab tergantung dari jumlah bibit ikan dan berapa banyak bahan makan ikan yang di keluarkan setiap kali memanen.

### **Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara**

#### ***Peningkatan Produksi dan Produktivitas***

Tingkat perekonomian suatu desa dapat mempengaruhi jalannya proses penyelenggaraan pembangunan. Dengan adanya perekonomian yang baik maka suatu desa dapat berkembang dan menjadi desa otonom yang lebih maju.

Untuk penambahan jumlah keramba menurut Muslik bisa saja terus dilakukan. Hanya saja kalau berharap dari bantuan pemerintah itu dananya sangat terbatas. Sementara untuk berharap swadaya masyarakat, itu cukup memberatkan terutama bagi pembudidaya keramba pemula karena biaya satu unit keramba terbilang mahal mengingat harga bahan yang digunakan memang mahal.

Selain itu, permasalahan yang akan muncul dari banyaknya pembudidaya ikan keramba adalah pasar, dimana jika produksi tinggi maka harga pasar bisa anjlok. Sementara biaya produksi itu cukup mahal, dan itu juga menjadi perhitungan dalam manajemen usaha masyarakat. “Untuk budidaya keramba air tawar itu pasar kita masih pasar lokal, jadi saat produksi menumpuk otomatis harga bisa anjlok.

Pemerintah desa berupaya meningkatkan produksi ikan terutama ikan keramba untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung peningkatan konsumsi ikan daerah. dan terus berupaya untuk menaikkan produksi pangan di Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara terutama di sektor perikanan..

Melihat kondisi tersebut, maka pembenihan ikan juga bisa jadi usaha bagi masyarakat dan potensi tersebut mesti dapat dimanfaatkan. “Maka itu kita terus melakukan pelatihan-pelatihan pembenihan ikan kepada masyarakat. Harapannya tidak saja kuantitas benih yang diproduksi, tapi juga kualitasnya.”Semakin banyak unit-unit pembenihan maka akan semakin baik. Apalagi mengingat produksi benih ikan di balai benih perikanan di Muara Muntai saat ini masih terbatas.

### ***Penyediaan Lapangan Pekerjaan Melalui Pendapatan***

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia akan sangat penting untuk kelangsungan lapangan pekerjaan di Desa Pulau Harapan Kabupaten Kutai Kartanegara. Strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan sumber daya manusia khususnya dikaitkan dengan sumber daya manusia berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di Desa Pulau Harapan Kabupaten Kutai Kartanegara, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya. Secara teoritik pemberdayaan (empowerment) dapat diartikan sebagai upaya untuk menguatkan masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar menggali potensi dirinya dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas hidupnya salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidupnya diantaranya adalah melibatkan mereka untuk berpartisipasi aktif dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi masyarakat sekitar. Partisipasi ini tentunya didukung dengan adanya program-program pemerintah sebagai kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan program-program pembangunan, khususnya di wilayah sungai.

Dengan pembudidayaan ikan merupakan bentuk lapangan pekerjaan yang memang digeluti oleh masyarakat Desa Pulau Harapan pada umumnya.

Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”

Dengan demikian bentuk upaya pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dengan membina dan melatih masyarakat yang ada di Desa Pulau Harapan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara agar terus survive dalam kehidupan sehingga kedepannya memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang baik.

### ***Menjaga Pelestraian Sumber Daya Hayati Perikanan***

Upaya meningkatkan produksi ikan budidaya terutama budidaya keramba dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk di Muara Muntai dengan tetap memperhatikan keamanan dampak lingkungan.

Di Muara Muntai, usaha budidaya ikan keramba yang sedang marak adalah budidaya darat atau budidaya keramba, yang dilakukan disepanjang perairan Sungai Mahakam dan ini sudah berlangsung lama dan terus bertambah jumlahnya.

Sejauh ini, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai kartanegara sudah terdapat lebih kurang 46.000 unit keramba yang tersebar di sejumlah titik di Sungai Mahakam. Air yang mengalir di sungai tersebut juga merupakan sumber air bagi kebutuhan masyarakat, termasuk juga sumber penghidupan bagi populasi ikan.

Dengan semakin tumbuh berkembangnya usaha budidaya keramba di sepanjang sungai, maka ada kekawatirkan suatu saat akan berdampak negatif terhadap lingkungan jika tidak disertai denganantisipasi melalui pengendalian.

Menurut Kepala Desa yaitu Sapuansyah di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa:

“Sampah atau sisa dari pakan ikan yang larut atau mengendap terlalu banyak di dasar sungai bisa saja menguap dan menciptakan zat kimia atau racun yang berbahaya bagi kesehatan, baik bagi manusia maupun bagi kelestarian populasi ikan di sepanjang sungai. “Jika tidak dikendalikan, usaha budidaya keramba di sepanjang perairan sungai sekitar pemukiman masyarakat tidak dipungkiri suatu saat akan berkontribusi terhadap dampak pencemaran sungai,” (Wawancara, 17 april 2015)

Maka dari itu, pihak pemerintah daerah akan mengendalikan pertumbuhan usaha budidaya ikan keramba air tawar dengan mengarahkan ke usaha budidaya perairan laut dengan sistem keramba jaring apung (kajapung). Akan sosialisasikan teknologi keramba jaring apung ini kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah pesisir,

Diharapkan, teknologi jaring apung ini nantinya dapat berkembang dan diminati masyarakat. Apalagi mengingat nilai jual ikan seperti kerapu, kakap dan beberapa jenis ikan budidaya laut itu sangat menggiurkan.

Hal itu dilakukan mengingat perairan umum seperti sungai dan danau yang mejadi populasi ikan di wilayah hulu cukup terbatas, dan jika ikannya terus menerus dieksploitasi apalagi secara berlebihan, maka dikhawatirkan populasi ikan lokal air tawar itu terancam.

Terlebih jika penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, tentunya kelestarian ikan tidak dapat terkontrol, dan bisa merugikan masyarakat sendiri di kemudian hari.

Menurut Pemerintah Daerah Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa “Budaya menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh masyarakat wilayah hulu masih kurang berpihak pada pelestarian. Sekalipun sudah membentuk beberapa kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), namun kebanyakan masyarakat masih rendah kesadarannya dalam menjaga kelestarian populasi ikan”.

Hal yang dinilai mengkhawatirkan mengenai kelanjutan populasi ikan di wilayah hulu adalah penangkapan ikan pada saat musim ikan bertelur. Dimana pada musim ikan bertelur itu merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat penangkap ikan, karena ada nilai ekonomi plus, karena selain bisa menjual ikan tangkapan, telur ikan juga memiliki nilai jual yang cukup digemari masyarakat. “Pada umumnya ini terjadi pada ikan lokal jenis biawan dan gabus. Tentunya hal ini bisa mengancam populasi ikan karena tidak sempat melepas telur,”

Alasan tersebut salah satu yang menjadi dasar pihak pemerintah mengarahkan pengembangan ikan budidaya untuk nelayan wilayah hulu. “Boleh saja masyarakat menangkap ikan, tapi mesti memperhatikan kelestarian, seperti menggunakan alat tangkap yang dilegalkan, jaring dengan ukuran yang telah ditentukan, tidak menggunakan alat strum maupun racun ikan.

Dengan demikian upaya pemerintah tersebut di atas adalah demi kelestarian lingkungan, guna mengantisipasi kepadatan keramba di sungai. Arahnya juga untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah sungai.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Perikanan Di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Dalam realita kehidupan masyarakat, pengembangan potensi perikanan salah satu kebutuhan usaha yang dilakukan masyarakat. kerena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat pulau harapan. Dengan demikian, hal tersebut berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, agar pemenuhan kebutuhan tercapai. sikap tersebut yang dialami oleh para pembudidaya masyarakat Desa Pulau Harapan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah dalam pengembangan potensi perikanan di Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara yang penulis temui, yaitu:

### ***Faktor Pendukung***

Sistem kekeluargaan yang sangat erat antara masyarakat satu dengan yang lainnya merupakan kunci kenyamanan dalam melakukan suatu pekerjaan, hal ini yang sampai saat ini masyarakat Desa Pulau Harapan masih konsisten memegang erat sistem kekeluargaan tersebut.

Adapun yang dibawah ini merupakan faktor pendukung Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan di Desa Pulau Harapan sebagai berikut:

#### ***a. Faktor Masyarakat***

Sistem kebudayaan masyarakat pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari, nilai nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pulau Harapan kebudayaan atau sistem yang berlaku adalah kekeluargaan, sehingga sangat memudahkan masyarakat menyelesaikan permasalahan baik itu permasalahan mengenai upaya pengembangan potensi perikanan maupun permasalahan yang lainnya.

### ***Faktor Penghambat***

Faktor penghambat merupakan suatu hal yang menghalangi untuk melakukan suatu kegiatan. Produksi tambak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai daerah produksi ikan budidaya terbesar di Kalimantan Timur mengalami kendala. Itu dikarenakan hampir 50 persen dari 76 ribu hektare tambak yang ada sudah tidak produktif.

Tidak produktifnya tambak-tambak dimaksud dikarenakan beberapa hal, terutama akibat kerusakan-kerusakan fisik tambak seperti kerusakan tanggul maupun pintu air, sehingga tambak tidak bisa digunakan.

Selain itu, ada juga beberapa tambak yang kurang produktif akibat ringkasan kesuburan tambak yang sudah menurun, sehingga petani enggan menabur benih karena produksinya yang kecil, bahkan bisa merugikan petani tambak.

Masyarakat Desa Pulau Harapan pun merasakan hal tersebut, adapun yang di bawah ini merupakan faktor penghambat Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Di Desa Pulau Harapan sebagai berikut :

- a. Tingginya Kenaikan Air Disungai
- b. Tingginya kenaikan air disungai sangat meresahkan masyarakat di Desa Pulau Harapan. sebab air tersebut akan membuat dampak pengaruh pembudidaya dalam pengembangan kurangnya Perhatian Pemerintah.

Secara umum yang menjadi penghambat upaya pemerintah dalam pengembangan potensi perikanan tidak terlepas dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap Desa Pulau Harapan.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sapuansyah selaku kepala Desa Pulau Harapan yang mengatakan bahwa :

“Faktor penghambat tersebut sangat jelas dapat dilihat, kurang diperhatikannya Desa Pulau Harapan oleh pemerintah daerah. Sehingga kondisi Desa Pulau Harapan sangat tertinggal dibandingkan desa lain yang berada didaerah Kecamatan, seperti Desa Muara Muntai Ulu dan Desa Kayu Batu.

Hal senada juga ditambahkan oleh bapak musa selaku pembudidaya ikan Desa Pulau Harapan yang mengatakan bahwa :

“Desa Pulau Harapan merupakan desa yang sangat dianak tirikan oleh pemerintah daerah, sebab bantuan pemerintah pun tidak sesuai, contohnya adanya bantuan perahu. dimana desa pulau harapan tidak ada satupun yang dapat.sangat berbeda dibandingkan dengan desa-desa lain. Hal ini yang menjadi penghambat kemajuan pembudidaya dalam pengembangan potensi perikanan di Desa Pulau Harapan”. (Wawancara, 20 april 2015)

Dengan demikian tanpa adanya perhatian pemerintah daerah dibarengi dengan kurangnya fasilitas yang tersedia membuat pengembangan potensi perikanan akan menjadi terhambat dan tidak berkembangngan potensi perikanan

### ***Kesimpulan***

Upaya pemerintah Pulau Harapan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengembangan potensi perikanan adalah dengan peningkatan produktif dan produktifitas berupa budi daya ikan di keramba. Potensi ini cukup signifikan untuk dikembangkan karena akan berdampak pada kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga mengadakan pelatihan bibit ikan kepada para nelayan agar dapat memaksimalkan kemampuan diri sehingga lebih mandiri dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga memiliki pendapatan sendiri. Dan terakhir yaitu menjaga pelestarian hayati dengan sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap pentingnya ekosistem yang ada di sungai dan tidak merusaknya. Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah dengan pengawasan kepada masyarakat nelayan khususnya pada proses penangkapan ikan.

### ***Saran***

1. Perlu menjadi perhatian pemerintah baik tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan untuk selalu memberikan dukungan baik berupa bantuan dana dan juga pengawasan sehingga secara langsung dapat meningkatkan perkonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Harapan yang pada umumnya adalah masyarakat nelayan, baik pada usaha keramba maupun penangkapan ikan secara tradisional.
2. Potensi yang dimiliki oleh Desa Pulau Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam berupa sungai yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mencari rezeki dan masyarakat yang mandiri serta mau bekerja keras untuk dapat dikembangkan.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim.2002. *Kamus Besar Indonesia*.Jakarta :Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa*. Bandung :Fokus Media.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Bandung : focus Media.
- George R Terry, Leslie W Rue, 2005. Alih bahasa G.A Ticoalu, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi : Yogyakarta
- Martoyo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. BPFE : Yogyakarta.
- Miles, Mathew B.A dan Michel Huberman. 2000 *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohedi. Media Group : Jakarta
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remajakarya, Bandung
- Mubyarto 1985.*Nelayan dan Kemiskinan*.PT. Rajawaki ; Jakarta.
- Munir, Dasrildkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.YPAPI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (diakses 26 mei 2011)
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentangDesapasal 12 ayat (1)
- Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.13 tahun 2009 pasal 1 ayat (6)
- Sahdan, Gorris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung : FPPD.
- Sembiring, Iskandar(Ed). 2011. CSR Review; Media for Business and Community Development. Jakarta: VolIII-No. 5/Mei-Juni.
- Sembiring, Sentosa. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Siagian*, Sondang P..1986. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian.2011. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta : PustakaLP3ES.
- Soekanto, Soerdjono. 1990.*Teori Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemarsono.(2002). *Komunikasi Politik*. Bandung :Universitas Terbuka
- Susanto, Astrid. 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta

### **Dokumen-dokumen:**

- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1
- Undang-Undang No.32 Tahun2004 pasal 202 ayat 1 sampai 3